



# Dinas Biasa Mulai Kerjakan Progam

## Gubernur Siapkan anksi Soal Laporan Kinerja

JAKARTA, KOMPAS — Satuan kerja perangkat daerah di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah bisa mulai mengerjakan program pembangunan. Mereka tinggal memiliki waktu sekitar 8 bulan untuk menyelesaikan berbagai program dan kegiatan dengan anggaran Rp 69,286 triliun.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, verbal (berita acara) Peraturan Gubernur (Pergub) tentang APBD DKI Jakarta 2015 selesai ditandatangani Gubernur, Senin (20/4). "APBD sudah bisa cair. Lelang (untuk kegiatan pembangunan) juga sudah bisa dimulai. Total anggaran yang disetujui tetap Rp 69,286 triliun," katanya.

Saefullah menambahkan, pemangkas sudah dilakukan atas sejumlah program untuk memenuhi selisih Rp 3,62 triliun yang tidak bisa digunakan Pemprov DKI Jakarta. Landasan hukum dengan pergub menyebabkan Pemprov DKI tidak bisa mendapatkan pagu perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 secara penuh.

"Kami pangkas program untuk sosialisasi, pengadaan tanah, bantuan dan hibah juga kami kurangi untuk efisiensi. Anggaran tunjangan kinerja daerah juga kami ambil sekitar Rp 300 miliar," ujarnya.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, pihaknya sudah siap mengeksekusi program dan kegiatan yang telah disusun untuk tahun 2015 seiring cairnya APBD. "Kalau pergub sudah ditandatangani hari ini (Senin), barangkali besok kami dapat surat edaran bahwa kami sudah bisa mengeksekusi program pembangunan," ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Yusmada, sepanjang barang dan jasa sudah ada dalam katalog, dinas tinggal memproses pembeliannya dan bisa tanda tangan kontrak. Untuk barang dan jasa yang belum ada dalam katalog, dinas bisa mengusulkan untuk dilelang melalui Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP).

Dinas Bina Marga memperoleh anggaran Rp 3,8 triliun. Menurut Yusmada, pihaknya akan fokus pada perbaikan jalan secara permanen. Program ini bisa segera dieksekusi karena barang kebutuhan sudah ada di katalog. "Setelah itu, kami lanjutkan dengan proses lelang untuk pembangunan dan perbaikan jembatan dan betonisasi jalan. Kami harus usul dulu ke BLP untuk lelang," katanya.

Selain itu, Dinas Bina Marga juga akan fokus pada pembebasan lahan, terutama untuk proyek *mass rapid transit* dan beberapa ruas jalan yang dilebarkan, seperti Jalan Hankam dan Jalan Joglo Raya.

Khusus pembangunan jalan layang di tiga lokasi yang sebidang dengan pelintasan kereta, yaitu di Cipinang Lontar, Bintaro, dan Jalan Panjang, masih harus menunggu proses tahun jamak.

Dengan sisa waktu hanya delapan bulan, Yusmada mengatakan, pihaknya optimistis bisa melaksanakan program yang telah disusun.

### Tunjangan kinerja

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono, pihaknya tengah menyiapkan kelengkapan untuk proses pencairan dana.

Soal tunjangan kinerja daerah dinamis yang hingga kini belum

cair, menurut Heru, diperkirakan baru bisa dicairkan pada Mei 2015. Bersama Badan Kepegawaian Daerah, pihaknya harus mengecek ulang laporan kinerja yang akan menentukan besar kecilnya tunjangan.

Heru menambahkan, dirinya mendapatkan laporan dari pegawai yang menduga ada ketidakadilan dalam pemberian tunjangan karena dugaan konspirasi dalam proses penilaian, terutama antara atasan dan bawahan di satuan kerja yang sama. Manipulasi laporan kinerja dilakukan untuk menambah besaran tunjangan.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan peraturan untuk mencegah hal itu terjadi. Salah satu poinnya adalah sanksi copot jabatan bagi pejabat yang terbukti memanipulasi laporan kinerja. Sementara bagi staf, Basuki mengusulkan penghapusan tunjangan kinerja setidaknya selama tiga bulan.

Selain tunjangan kinerja statis yang dihitung berdasarkan prestasi, Pemprov DKI juga memberikan tunjangan kinerja dinamis, antara lain diukur berdasarkan jumlah poin *item* pekerjaan. (FRO/MKN)